

TANGGAPAN BP

TERHADAP LAPORAN KEEMPAT

PANEL PENASEHAT INDEPENDEN TANGGUH (TIAP)

PADA PROYEK LNG TANGGUH

MARET 2005

Tanggapan BP pada laporan TIAP 2005

Kami berterima kasih pada Panel Penasehat Independen Tangguh atas laporan ke-empat Proyek Tangguh yang saat ini tengah berjalan di Teluk Bintuni, Papua Barat, Indonesia. Laporan ini berdasar pada kunjungan ke Indonesia bulan November 2005.

Kami sangat menghargai saran-saran independen yang diberikan TIAP kepada BP terhadap dampak sosial-ekonomi serta dampak lingkungan dari proyek ini, dan kami juga telah mengambil tindakan menerapkan sebagian besar dari rekomendasi yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada bagian lampiran dalam tanggapan ini, kami akan membahas rekomendasi utama dari laporan TIAP terakhir, yang kami janjikan akan kami penuhi tahun 2005, serta memaparkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam penerapannya.

Tanggapan ini meliputi langkah-langkah tambahan yang kami usulkan, dimulai dari tahun 2006 berdasar laporan TIAP keempat serta penilaian yang kami lakukan secara berlanjut.

Tangguh merupakan proyek yang sangat menantang, mengingat proyek ini terletak di kawasan yang memiliki kondisi kompleks secara lingkungan maupun sosial. Namun begitu, aspirasi kami adalah menciptakan sumber keuntungan bagi semua yang terlibat – baik dalam arti keuntungan finansial maupun operasional yang akan diterima pemerintah Indonesia, BP, para mitra usaha Tangguh¹, pelanggan serta pemegang saham; serta keuntungan ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat Teluk Bintuni, masyarakat Papua, serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kami sangat menghargai pengakuan Panel terhadap dampak positif yang telah dicapai oleh kerja BP serta mitra kerjanya dalam proyek ini, serta atas dukungan luasnya terhadap Papua serta Indonesia secara umum.

“Dengan dimulainya proyek ini oleh BP, para pemimpin di seluruh Teluk Bintuni, Papua Barat serta pemimpin di Jakarta mulai melihat keuntungan yang dicapai pada kawasan tersebut juga untuk Indonesia secara umum. Tentu saja ketidakpuasan atau ketidakpastian tetap ada, juga harapan-harapan yang kurang realistis, serta ketegangan antara penduduk yang

¹ BP Berau Ltd merupakan operator dari Proyek Tangguh mewakili perusahaan itu sendiri serta beberapa perusahaan mitra lainnya. Para mitra kerja dalam Proyek Tangguh merupakan kontraktor dari Pemerintah Indonesia yang terbagi dalam tiga pembagian kontrak. Mereka adalah: China National Offshore Oil Corporation, Mitsubishi Corporation-INPEX Corporation; Nippon Oil Corporation dan Japan National Oil Corporation; Kanematsu Gas; dan LNG Japan Corporation.

terkena dampaknya secara langsung, namun Panel melihat terjadinya peningkatan mufakat, khususnya diantara para pemegang adat setempat; bahwa proyek Tangguh akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Teluk Bintuni dan Papua secara umum.”²

Tanggapan ini memaparkan konteks dengan menggarisbawahi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di Tangguh selama tahun 2005, termasuk bidang-bidang yang ditekankan kepentingannya oleh TIAP; sebelum akhirnya membahas rekomendasi panel satu per satu.

Perkembangan Proyek Tangguh

Tahun 2005 merupakan tahun yang penting bagi Tangguh. Proyek telah disepakati dan berbagai kegiatan mulai. Sampai 31 Desember 2005 proyek telah mencapai lebih dari 23%, sesuai dengan rencana anggaran serta jadwal yang ditentukan. Di lokasi pembangunan fasilitas LNG, pengerjaan berlanjut pada pembukaan lahan serta penterasan, dengan fokus pada pembangunan fasilitas pangkalan produksi gas dan dermaga. Jumlah kapal-kapal yang berlabuh meningkat pesat dengan bertambahnya pekerjaan yang harus dilakukan di lepas pantai. Bersamaan dengan itu sebagai bagian program pemasangan pipa dan platform lepas pantai, sejumlah kapal besar melakukan analisa dasar laut serta pengecekan rute pipa, juga memproses data seismik.

Pembangunan dua platform lepas pantai terus mengalami kemajuan di kawasan Guna Nusa, dekat Jakarta, dan sebagian pipa yang diproduksi Jepang didatangkan ke Batam untuk proses pelapisan.

Semua kegiatan teknis serta pencapaiannya berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Keselamatan tetap merupakan perhatian utama. Tahun 2005 proyek mencapai lebih dari 7,5 juta jam kerja tanpa adanya catatan kecelakaan satu pun .

Dalam bidang dampak sosial, tahun 2005 kami menyusun ‘Program Sosial Terpadu’ (PST/ISP) yang memasukkan komponen-komponen program yang dirancang memberi keuntungan bagi masyarakat di kawasan tempat kami bekerja. Ini merupakan langkah yang akan kami gunakan dalam menerapkan ‘Strategi Sosial Terpadu’ (SSP/ISS).

Delapan fokus bidang SSP , sebagaimana dijelaskan dalam AMDAL³ 2002 telah dikembangkan ke dalam 15 program penerapan di dalam PST. Dalam setiap program diciptakan rencana 5 tahun berdasar serangkaian prinsip yang melibatkan pemberdayaan, peningkatan kapasitas serta pembangunan kemitraan.

² Panel Penasehat Independen Tangguh : “Laporan keempat pada Proyek LNG Tangguh”, Februari 2006, hal. 3.

³ AMDAL merupakan penilaian dampak sosial serta lingkungan yang disahkan pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2002

Pendefinisian program

Strategi Sosial Terpadu	PST – Program Sosial Terpadu
Strategi Pertumbuhan Diversifikasi	Penguatan pemerintahan dan masyarakat sipil
	Pemberdayaan Usaha Kawasan Kepala Burung
Dampak Keuangan	Pengelolaan pendapatan
Pelatihan dan pengelolaan tenaga kerja	Urusan Tenaga kerja dan Industri
	Pelatihan
Pengamanan terpadu berbasis masyarakat	Pengamanan terpadu berbasis masyarakat
Pembangunan Berdasar dukungan Masyarakat	Langkah-langkah Perencanaan masyarakat/ Pembangunan Masyarakat (di DTDP)
	Kesehatan
	Pendidikan (Pendidikan dasar, penyediaan bea siswa)
	Kepemerintahan (Kabupaten, Kecamatan dan Desa)
	Pemberdayaan Perempuan
Usaha Masyarakat	Usaha
Pemukiman kembali Tanah Merah	Pengalihan lahan serta perencanaan pemukiman kembali
Pembentukan Forum dan Yayasan	Pembentukan Forum dan Yayasan

Sifat dari perkembangan dari SST menjadi PST utamanya berasal dari pengalaman Tim Tangguh di Desa-desa terkena dampak langsung (DTDP) termasuk di dalamnya pemfokusan baru terhadap beberapa kawasan yang juga dicatat oleh TIAP memerlukan tambahan upaya baru. Secara khusus program ISP mencerminkan pelajaran yang dipetik mengenai perlunya pembangunan kapasitas sebagai elemen penting dalam bidang pembangunan. Saat ini lembaga-lembaga dalam pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan layanannya kepada masyarakat, dan pendidikan serta pelayanan kesehatan amat sangat kurang. Laporan terbaru pada penilaian terhadap anggaran belanja daerah Papua yang dipublikasikan oleh Bank Dunia beberapa waktu lalu memberikan dorongan dan tantangan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan, khususnya dalam hal penataan anggaran, pengawasan keuangan serta perlunya sistem pemerintahan yang baik.

PST juga mencerminkan pengakuan bahwa tingkat pembangunan (proyek) harus sesuai dengan kapasitas masyarakat, para mitra, serta pemerintah daerah dalam mengelola keuntungan yang diperoleh.

Karena itulah elemen-elemen pembangunan kapasitas melekat erat dalam keseluruhan program ISP. Ini akan dilaksanakan dalam jangka panjang karena pembangunan kapasitas hanya akan berhasil setelah mengalami proses beberapa tahun. Pembangunan kapasitas perlu diikuti dengan pendekatan multi sektor serta multi level dengan menjaga agar visi jangka panjang tetap berjalan dan pada saat yang sama juga memberi kesempatan bagi berbagai metode dan pendekatan lain untuk diterapkan dalam penerapan jangka pendek.

PST juga menggabungkan pandangan berbagai ahli dalam bidang pembangunan masyarakat, serta sejalan dengan standar Bank pembangunan Asia /ADB⁴. (Rencana PST lengkap dapat ditemukan di situs ADB⁵). PST berkembang dari fokus semula di DTDP menjadi berfokus lebih luas terhadap Teluk Bintuni.

Dengan memasukkan rekomendasi TIAP tahun lalu, BP mengembangkan enam fokus kunci bagi PST 2005, yakni:

- Meningkatkan perhatian di desa-desa di kawasan pantai utara
- Meningkatkan komunikasi di Teluk Bintuni dengan pemerintah dan masyarakat
- Memahami isu pendapatan
- Program pengamanan terpadu berbasis masyarakat
- Pengelolaan tenaga kerja

Pada tahun 2005, Tangguh terus mencapai kemajuan yang nyata dalam berbagai aspek kerjanya, sebagaimana diakui oleh Panel. Tahun tersebut merupakan tahun yang cukup sibuk bagi kawasan DTDP, dengan adanya pembangunan sekolah-sekolah, klinik kesehatan, serta pemasangan sarana air bersih. Pada saat yang sama kami juga bekerja sama dengan berbagai LSM serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan serupa di bidang pendidikan dasar serta kesehatan masyarakat.

Sebagaimana diakui TIAP, ketidakpastian serta tantangan tetap ada, khususnya dengan masih adanya perasaan perlakuan tidak adil di antara penduduk desa di kawasan pantai utara. Meskipun kami mengakui bahwa ketidakpuasan akan tidak dapat dihindarkan, kami setuju dengan TIAP tahun lalu untuk memperpanjang inisiatif jangka pendek serta beberapa program yang saat ini tengah berjalan di desa-desa pantai utara. Beberapa langkah baru tengah direncanakan seperti yang akan dipaparkan dalam laporan tanggapan ini.

Kami juga menyadari perlunya memfokuskan diri pada menyebarkan informasi tentang Tangguh diseluruh kawasan teluk Bintuni serta memperkuat upaya komunikasi serta kerja sama dengan pemerintahan daerah yang baru. Kami membicarakan dampak perpindahan penduduk ke dalam (in-migration), khususnya kemungkinan dampak negatifnya dalam perpindahan penduduk

⁴ Bank Pembangunan Asia / ADB (The Asia Development Bank) adalah pihak yang menyediakan dana bagi proyek tangguh selama tahun 2006.

⁵ www.adb.org

pada skala besar, dengan menggunakan sebuah video. Kami memfokuskan perhatian khususnya pada kawasan pemukiman kembali Tanah Merah.

Dalam laporannya tahun lalu, TIAP mencatat kebingungan serta ketidakpastian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pembagian pendapatan serta aliran dana dari pemerintah pusat menuju propinsi dan pemerintah daerah, termasuk bagaimana kebijakan itu akan berpengaruh pada pemasukan yang diperoleh dari proyek Tangguh. Proyek ini masih perlu beberapa tahun lagi untuk berproduksi, namun tahun 2005 kami telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman kami terhadap sistem hukum yang berlaku serta mekanisme penyaluran pendapatan pemerintah untuk Papua. Kami juga mempelajari lebih banyak tentang sistem pemerintahan daerah dalam menangani anggaran belanja serta hubungan pendapatan dari proyek Tangguh dengan pendapatan dari sumber-sumber lain. Kami terus berlanjut mempelajari implikasi keuangan dari akibat pembagian Propinsi Papua serta implikasi dari Undang-undang Otonomi Daerah.

Melalui program ICBS guna menyediakan cara-cara pengidentifikasian serta penyelesaian permasalahan yang muncul, sebanyak 24 forum dibentuk di kawasan utara dan selatan Teluk Bintuni. Tujuannya adalah untuk menjadi sebuah kelompok kerja yang bertugas mengidentifikasi isu permasalahan desa serta menemukan jalan pemecahannya. Anggotanya terdiri dari para wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sendiri (termasuk kepala suku, kepala fam, serta ketua adat), dengan melibatkan unsur pemerintah serta polisi daerah. Forum ini merupakan forum independen yang lepas dari BP.

Selain dari pada itu, pelatihan terhadap isu hak asasi manusia dilakukan terhadap tim satpam lokal kami. Kami setuju dengan TIAP untuk mengembangkan prosedur yang lebih kuat untuk menghadapi kemungkinan kejadian yang mungkin saja melibatkan isu pelanggaran hak asasi manusia. Prosedur keamanan baru yang tersedia dalam situs BP, telah disosialisasikan dengan pihak berwenang Indonesia, dan dijelaskan pula proses dalam menanggapi tuduhan atau kejadian yang mungkin mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Kami mengakui perlunya melakukan kemajuan di tahun 2006 dalam bidang program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat.

Dengan makin meningkatkan pembangunan dalam proyek ini, perekrutan pegawai dari Papua juga meningkat, dan dengan gembira kami nyatakan bahwa kami mencapai target tenaga kerja secara umum yang ditetapkan dalam AMDAL. Kami mengakui perlunya membangun kemampuan warga Papua sehingga mereka mampu memenuhi standar kualitas sebagai pekerja di proyek kami ataupun di tempat lain. Sejumlah langkah dilakukan untuk menyediakan ketrampilan khusus, dan ini akan terus dilanjutkan/dikembangkan.

Di tahun 2006 dan seterusnya, kami bertujuan meningkatkan sumber daya kami setara dengan organisasi serta badan pembangunan yang lain dalam

mendukung pemerintah daerah serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.

Berikutnya akan kami sampaikan bahasan mengenai rekomendasi khusus yang diberikan Panel.

Pembangunan dan ketenagakerjaan

Rekomendasi TIAP: BP, bekerja sama dengan para kontraktor EPC, harus menetapkan prosedur mengidentifikasi para pekerja Papua yang mampu untuk mengikuti pelatihan peningkatan menuju jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus untuk prospek jangka panjang. Sebagai tambahan, upaya lebih luas harus dilakukan oleh BP dan para kontraktornya untuk meningkatkan daya beli barang dan layanan di kawasan tersebut.

Tanggapan BP: Kami sepakat dengan pandangan TIAP bahwa peoyek ini harus mampu menyediakan lapangan kerja dan pelatihan ketenagakerjaan bagi penduduk setempat. Fase-fase pembangunan akan menyediakan kesempatan luas dalam bidang pekerjaan, tentu dengan catatan bahwa ada bidang kerja temporer serta jangka pendek. Selama fase operasional Tangguh, jumlah lapangan kerja secara substansial akan lebih sedikit dan akan lebih memerlukan tenaga kerja ahli. Dengan begitu maka kami harus memisahkan antara pelatihan dan pengembangan ketrampilan tenaga kerja menuju proses pengoperasian jangka panjang BP, serta pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dalam fase pembangunan proyek itu sendiri.

Pengoperasian proyek jangka panjang akan memerlukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis dan non-teknis. Program pelatihan bidang teknis difokuskan untuk para operator LNG di masa datang. Ini merupakan program multi tahun yang meliputi pelatihan dalam pekerjaan (on-the-job training) dalam mengoperasikan LNG di Indonesia. Proyek juga mengakui bahwa akan adanya kesempatan kerja yang memerlukan ketrampilan non-teknis dalam mengoperasikan pabrik, seperti pekerjaan bidang administrasi, perencanaan, hubungan masyarakat, serta komunikasi internal dan eksternal. Pada saat ini terdapat sekisar 70 staf dalam bidang ini, mayoritas terdiri dari penduduk Papua. Selama tahun 2005 kami menawarkan sesi pelatihan formal yang meliputi kursus bahasa Inggris, kemampuan supervisor, kesadaran gender, tanggung jawab bersama, pengenalan isu-isu hak asasi manusia, serta pelatihan kerja itu sendiri. Dalam tahun 2006 kami akan melanjutkan mengidentifikasi para pengganti bagi peran-peran penting ini, dan aktif mengembangkan staf Papua misalnya dengan menawarkan pelatihan dan pendampingan.

Selama fase konstruksi, kami mendasarkan kerja kami dalam program pengelolaan tenaga kerja Tangguh yang bertujuan menjamin partisipasi penduduk lokal dalam ketenagakerjaan, sebagaimana disebutkan dalam AMDAL, serta meningkatkan kemampuan mereka. Pelatihan selama fase pembangunan memberi kesempatan bagi pekerja lokal untuk

mengembangkan kemampuan praktis secara lebih luas yang akan memberi kesempatan bagi mereka mendapatkan pekerjaan dengan perusahaan lain di Teluk Bintuni begitu periode konstruksi Proyek Tangguh selesai.

Tahun 2005 program pengelolaan tenaga kerja Tangguh memfokus pada 3 bidang:

- (1) membentuk proses perekrutan pekerja dari DTDP – ini merupakan tanggung jawab tim Proyek BP;
- (2) membantu kontraktor dalam membentuk proses rekrutmen pekerja dari kawasan non DTDP – ini merupakan tanggung jawab para kontraktor; dan
- (3) meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal

- (1) Perekrutan pekerja dari DTDP Setelah mengalami sejumlah kesulitan , proses perekrutan pekerja dari desa-desa kawasan yang terkena dampak langsung kini mulai berjalan lancar. Sampai Desember 2005 terdapat 2700 pekerja di lokasi pembangunan, 52 % di antaranya penduduk asli Papua, 25 % penduduk DTDP sesuai dengan komitmen AMDAL bagi proyek ini yakni menyediakan satu lapangan kerja bagi setiap rumah tangga di desa-desa ini. Kontraktor memberikan peringatan awal akan syarat-syarat tenaga kerja yang diperlukan kepada staf penghubung proyek, sehingga pekerja dari berbagai tingkat kemampuan di DTDP tahu akan adanya kesempatan ini.
- (2) Perekrutan pekerja non- DTDP Empat pusat perekrutan dibentuk di kawasan di luar DTDP, yakni di Manokwari, Sorong, Fakfak dan Bintuni. Di sini tanggung jawab perekrutan terletak di pundak para kontraktor berkoordinasi dengan kantor-kantor perekrutan tenaga kerja lokal. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, kontraktor dan sub-kontraktor serta masyarakat untuk menjamin bahwa proses seleksi bagi para pemohon jelas dan berlaku adil; serta untuk memperkuat kemampuan pemerintah setempat.
- (3) Peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal. Sebagaimana komitmen kami yakni menyediakan kesempatan kerja bagi setiap rumah tangga, kami berupaya membangun kemampuan para pekerja lokal serta meningkatkannya menjadi lebih baik. Mandat AMDAL dalam proyek ini adalah untuk memberikan pelatihan setidaknya 10 orang dari setiap desa dari sembilan DTDP selama tahap konstruksi. Pada tahun 2005, sebanyak 75 orang dari kawasan DTDP menerima pelatihan khusus di pusat pelatihan Jayapura dan Malang. Seharusnya lebih banyak dari jumlah tersebut yang menerima pelatihan namun kemampuan kapasitas gedung pelatihan tidak memungkinkan. Proses rekrutmen dan pemilihan ketrampilan difasilitasi oleh pusat pelatihan serta Kantor Tenaga Kerja Bintuni. Dalam program yang akan dilakukan selanjutnya, kami berencana melatih penduduk lokal sebagai operator alat berat, membantu mereka mencapai standar yang diperlukan dalam mendapatkan ijin kerja. Pelatihan di tempat kerja juga diatur dalam kontraktor perusahaan catering untuk memberikan kesempatan bagi wanita dan pria mengembangkan kemampuan dalam bidang catering serta pemeliharaan kamp.

Kami juga sependapat dengan pandangan TIAP untuk menyediakan kesempatan usaha bagi penduduk Papua terhadap penyediaan layanan dan barang bagi proyek ini. Kami bekerja sama dengan Korporasi Keuangan Internasional (yang merupakan sektor swasta Bank Dunia) serta UNDP dalam bidang program pemberdayaan usaha Papua. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan lokal yang berfokus pada usaha tingkat menengah-kecil di kawasan lokal serta daerah Kepala Burung. Tujuannya meningkatkan kapasitas usaha Papua serta meningkatkan hubungan antara para usahawan Papua dan proyek ini. Tujuan lain juga memberi kesempatan bagi mereka untuk bersaing di bidang pembangunan ekonomi kawasan Kepala Burung.

Rekomendasi TIAP : BP dan para kontraktornya harus melanjutkan upaya menjadikan lokasi LNG sebagai kawasan ekonomi “tanpa uang tunai”. BP juga harus melanjutkan pembayaran gaji pegawai lokal di desa mereka dan gaji pegawai lainnya langsung ke dalam rekening bank mereka di luar lokasi Proyek.

Tanggapan BP: Kami sepakat dengan rekomendasi TIAP dan kami telah memiliki sistem kartu elektronik yang ditempatkan di lokasi untuk membeli makanan kecil serta keperluan pribadi lainnya, dan biaya dari penggunaan fasilitas itu dipotong dari gaji pekerja yang menggunakannya. Kami yakin cara ini akan bisa mencapai tujuan sosial yakni menghindarkan terjadinya aliran uang dalam jumlah besar di kawasan sekitar lokasi LNG. Kami menjamin bahwa pekerja dari desa setempat digaji di desa mereka. Bank komunitas semula tidak berhasil mendapatkan ijin untuk bisa dioperasikan, namun sebuah kelompok tabungan bersama berbasis gereja telah dimulai, sehingga penduduk desa dapat menabung uangnya.

- **Rekomendasi TIAP : BP harus mendorong para kontraktor EPC untuk menjelaskan semua peraturan dan persyaratan yang berlaku kepada semua pegawai baru, termasuk penjelasan mengenai hukuman/sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut. BP juga harus menjamin semua elemen dalam Tata Tingkah Laku yang ditentukan oleh AMDAL diterapkan oleh para kontraktor EPC; dan termasuk dalam peraturan itu satu mekanisme yang memberi ruang bagi para pekerja untuk mengajukan keluhan akan adanya pelanggaran terhadap kondisi kerja atau perlakuan kerja tidak layak untuk diselidiki oleh sebuah tim independen yang terpercaya yang diberi akses pada sistem manajemen Tangguh.**

Tanggapan BP: Semua pegawai, BP dan para kontraktor, mendapatkan sesi pengenalan mengenai aturan-aturan yang berlaku di kamp, dan diberitahu tentang hukuman bagi pelanggaran aturan-aturan tersebut. Di Tangguh kami menjamin bahwa kami melakukan bisnis dengan mitra yang memiliki persyaratan sah dan yang bergerak dalam cara-cara yang sesuai dengan komitmen BP terhadap etika – sebagaimana diwajibkan dalam Tata Peraturan

Tingkah Laku dalam grup kami⁶. Para pekerja wajib melaporkan setiap pelanggaran atau tindakan yang terjadi. Telah disediakan cara dan sistem pelaporan sehingga pekerja dan kontraktor bisa melaporkan pelanggaran kebijakan BP secara rahasia/konfidensial menggunakan program yang disebut 'OpenTalk'. Program ini memungkinkan pekerja dan kontraktor mengungkapkan masalah atau hal-hal lain berkaitan etika dan persyaratan dalam Tata Peraturan Tingkah Laku BP secara rahasia. Telepon bebas pulsa, nomor faksimil, alamat pos dan email juga telah disediakan untuk pelaporan pelanggaran ini. Semua pelaporan yang dilakukan melalui sistem ini akan disalurkan ke pihak berwenang setempat yang independen dari BP Indonesia atau dari manajemen Tangguh. Grup Kesesuaian dan Etika BP bertugas mengawasi integritas program ini agar keluhan yang disampaikan ditangani secara layak.

Di Tangguh, kami melaksanakan komitmen yang tercantum dalam AMDAL secara sungguh-sungguh, termasuk peraturan ketenagakerjaan serta penyediaan sistem penyampaian keluhan. Kontrak dengan para kontraktor EPC ditetapkan sesuai dengan persyaratan pengelolaan tenaga kerja. Kami memonitor pengelolaan tenaga kerja dan dalam tahun 2006 kami berniat melaksanakan audit untuk melihat apakah mekanisme penyampaian keluhan telah tersedia atau tidak diantara para kontraktor kami, juga apakah itu telah di dokumentasikan secara benar sebagaimana disyaratkan dalam AMDAL. Kami juga berniat mempelajari kembali prosedur kami untuk menjamin penilaian independen tersedia kalau ada pekerja BP yang mengajukan gugatan/ keluhan.

Rekomendasi TIAP: BP harus mengadopsi mekanisme penyampaian keluhan bagi anggota masyarakat, mempublikasikan serta menjelaskannya secara luas, serta menjamin desa-desa dan pekerja dari DTDP, bahwa mengajukan keluhan tidak akan berakibat buruk bagi mereka; dan akan – bila diperlukan, mendapat perhatian dari pihak penilai independen.

Pada saat ini kami berkonsultasi dengan penduduk lokal mengenai prosedur penyampaian keluhan yang akan memberi kesempatan bagi mereka untuk mengajukan keluhan secara formal berkaitan dengan proyek ini. Termasuk di dalamnya adalah segala bentuk keprihatinan berkaitan isu hak asasi. Masyarakat disadarkan untuk tahu tentang cara-cara serta proses mengajukan keluhan berkaitan dengan proyek, proses tanggapan yang diberikan, serta ketetapan yang diambil Proyek dalam rangka menghormati dan mempromosikan hak asasi. Sebagai bagian dari prosedur penyampaian keluhan, tersedia beberapa cara bagi penggugat untuk berkonsultasi dengan badan/lembaga di luar proyek. Anggota masyarakat yang hendak mengajukan keluhan dapat berkonsultasi dengan forum desa – seperti yang telah disebutkan sebelumnya – untuk menilai tingkat kasus yang diajukan, serta tingkat tanggapan formal dan tindakan dari pihak proyek. Kalau forum desa menolak tanggapan proyek, masalah tersebut bisa dibawa dalam pertemuan antara masyarakat, adat, lembaga agama, pemerintah, atau wakil-

⁶ Tata Tingkah Laku BP menetapkan standar bisnis untuk kelompok ini dan diterapkan terhadap semua pekerja BP diseluruh dunia. Silakan lihat situs www.bp.com.

wakil masyarakat lainnya serta wakil dari pihak Tangguh. Kalau kesepakatan akhir tak bisa dicapai, pengugat akan diberitahu ke mana keluhan bisa diproses lebih lanjut. Kami bertujuan untuk menyediakan prosedur penyampaian keluhan ini tersedia dalam situs internet kami.

Rekomendasi TIAP: *BP harus terus menerus menjelaskan alasan keselamatan akan zona kawasan yang terlibat dalam proyek ini kepada para nelayan serta pejabat berwenang, dan meningkatkan peralatan yang tersedia bagi para nelayan untuk mengganti gangguan bagi mata pencaharian mereka yang diakibatkan oleh adanya proyek pembangunan serta zona larangan melaut.*

Tanggapan BP: Kami sepakat dengan Panel. Zona keamanan eksklusif telah dan akan terus dikomunikasikan secara luas dalam bentuk poster, buku-buku komik serta melalui siaran radio. Jumlah pelanggaran masuk kawasan zona eksklusif menurun tajam setelah dibentuk pada tahun 2005. Untuk membantu para nelayan berlayar lebih jauh ke tengah lautan, proyek tengah membahas rencana penyediaan motor tempel bagi setiap keluarga nelayan yang didata pada tahun 2002. Sebelum menerima bantuan motor, setiap keluarga nelayan harus mampu membuktikan bahwa mereka memiliki perahu yang cocok untuk menggunakan motor. Kebanyakan nelayan pada saat ini tidak memiliki perahu yang sesuai untuk dipasangi motor tempel, sehingga proyek akan memfasilitasi pembuatan perahu-perahu baru dengan memberikan pinjaman peralatan. Program PST juga memasukkan pelatihan pemeliharaan mesin motor tempel serta pembuatan perahu untuk mendukung kegiatan perikanan tingkat lokal.

Kami juga mengakui bahwa banyak penduduk mengalami kesulitan memahami skala lengkap dari pengoperasian proyek Tangguh pada saat nantinya keseluruhan pembangunan selesai dan Proyek mulai beroperasi, termasuk ukuran kapal-kapal yang akan mengangkut hasil produksi LNG dan yang akan menyediakan sarana operasi, serta sandaran/dermaga yang diperlukan. Maka komunikasi dan diskusi mengenai aspek dari proyek akan terus berlanjut untuk menjaga zona perairan keamanan eksklusif guna menjamin keamanan penduduk desa serta staff operasi.

Keamanan dan hak asasi.

Rekomendasi TIAP: *kursus pelatihan dalam bidang hak asasi harus diterapkan bagi para personil BP dan kontraktor yang terlibat dalam segala aspek keamanan. Kursus ini harus ditawarkan kepada semua anggota personil polisi yang ditugaskan di Bintuni, Babo serta kawasan Tangguh. BP harus menjamin bahwa muatan yang terdapat dalam pelatihan akhirnya dihormati dan dijalankan.*

Tanggapan BP: Kami sepakat bahwa semua personil keamanan proyek Tangguh harus diberi pelatihan dalam bidang hak asasi. Delapan kelas telah dilaksanakan pada tahun 2005, melibatkan sejumlah LSM terkemuka yang berbasis di Papua yang mengkhususkan diri pada bidang hak asasi. Diantaranya adalah Elsham Papua, LBH Jayapura, LP3BH Manokwari,

Kontras Papua, Komnas HAM Papua, UNCEN (Human Rights Center), ALDP dan LP3A Papua. Elsham merupakan koordinator dari program pelatihan yang didukung oleh Proyek Tangguh ini. Tiga sesi kursus lainnya direncanakan dilaksanakan di tahun 2006 bagi para personil yang belum mengikuti kursus tahun 2005. Termasuk dalam rencana kami adalah melakukan pelatihan gabungan dengan pihak Kepolisian. Pelatihan hak asasi akan ditawarkan oleh Proyek Tangguh. Pada saat ini pembicaraan tengah berlangsung dengan sebuah organisasi hak asasi di Indonesia untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan ini.

Rekomendasi TIAP : *BP harus terus menekankan kepentingan Aturan Keamanan Lapangan terhadap / kepada Polda Papua serta kepada semua personil polsis baru yang ditempatkan di Teluk Bintuni. Harus dijelaskan pula semua material serta dukungan finansial yang disediakan dalam Aturan tersebut.*

Tanggapan BP: Kami sepakat. Kami akan melanjutkan penekanan kepentingan aturan keamanan lapangan kepada Kapolda Papua serta personil polisi dan militer di kawasan Teluk Bintuni. Kami bekerja sama dengan BP Migas, badan pengaturan gas minyak dan gas pemerintah Indonesia dalam mensosialisasikan program bagi para polisi untuk menegakkan aturan keamanan lapangan.⁷

Rekomendasi TIAP: *Prosedur Keamanan Proyek Tangguh harus ditingkatkan dan diperluas, tidak hanya terbatas pada keluhan terhadap personil keamanan; tetapi juga dipublikasikan dan dijelaskan kepada para pekerja serta masyarakat. Proses pengajuan gugatan atau keluhan harus memasukkan kemungkinan penilaian dari pihak independen dari BP serta harus jelas bahwa hukuman akan diberlakukan kepada semua orang yang dinyatakan melakukan pelanggaran hak asasi.*

Tanggapan BP: Kami sepakat bahwa proses ini harus tersedia bagi semua staff dan masyarakat setempat untuk melaporkan serta menangani segala keprihatinan berkait pada isu hak asasi; dan kami telah menyediakan tiga prosedur untuk menangani permasalahan ini. Sebagaimana prosedur keamanan, prosedur ini disediakan bagi kepentingan para pekerja serta masyarakat umum. Ketiga mekanisme pelaporan pada pelanggaran hak asasi bersifat saling melengkapi, dan ketiganya bertujuan membangun serta mempromosikan isu hak asasi.

Yang pertama, prosedur keamanan Tangguh, “ Mengelola Tuduhan Pelanggaran atau Kejadian terkait Ketetapan Keamanan⁸”, dimaksudkan menyediakan proses di mana proyek akan menanggapi gugatan atau kejadian yang melibatkan isu pelanggaran hak asasi khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan keamanan operasi proyek Tangguh. Prosedur keamanan secara khusus dibangun berdasar aturan keamanan lapangan yang dibentuk bersama kepolisian, dan ini mencerminkan proses yang akan

⁷ Aturan keamanan lapangan ini tersedia di situs internet BP, yakni www.bp.com/tangguh.

⁸ Prosedur ini tersedia di situs internet at www.bp.com/tangguh

dilakukan BP dalam melaporkan kejadian kepada pihak berwenang dari pemerintah Indonesia serta bagaimana melakukan penyelidikan lanjutan. Juga melaksanakan ketentuan Prinsip-Prinsip Sukarela (the Voluntary Principles) dalam Keamanan dan Hak Asasi yang dikembangkan dan diterapkan oleh berbagai pemerintahan, LSM serta perusahaan pengeplorasi di seluruh dunia. Prosedur ini dikembangkan setelah diadakan konsultasi dengan organisasi hak asasi internasional dan Papua, serta tokoh-tokoh lainnya. Kami meneruskan bekerja sama dengan polisi dan pihak berwenang Indonesia dalam menjamin agar semua pihak paham serta melaksanakan prosedur ini. Prosedur juga telah diumumkan kepada para kontraktor utama Proyek, termasuk penyedia layanan keamanan Tangguh sebagai bagian dari proses bergulir yang dilakukan bulan September dan Oktober 2005. Semua laporan akan direkam dalam buku laporan keluhan Tangguh, agar manajemen Tangguh bisa menelusuri dan mereview hakikat dari tuduhan atau insiden, serta mengevaluasi keefektifan keamanannya.

Dalam hal review independen, sebagai bagian dari prosedur keamanan, BP merujuk pada Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang akan melaporkan segala bentuk kejadian berkaitan dengan keprihatinan publik pada pasukan keamanan. Komnas HAM merupakan badan independen yang ditunjuk pemerintah Indonesia yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi berkaitan dengan kerja polisi atau militer. Untuk dakwaan berkaitan penyedia layanan keamanan bagi proyek Tangguh, BP akan melakukan sebuah penyelidikan internal yang akan dilaksanakan secara independen melalui manajemen Tangguh.

Dalam hal pekerja, kami mendukung prinsip-prinsip bahwa pekerja harus bisa melaporkan keluhannya secara konfidensial. Kejadian berkaitan keamanan tercakup dalam sistem OpenTalk yang disebutkan sebelumnya, dimana para pekerja dan kontraktor BP bisa melaporkan pelanggaran kebijakan BP secara konfidensial. Untuk menghindarkan terjadinya insiden, proyek juga telah mengambil langkah meningkatkan kesadaran terhadap kebijakan Proyek meliputi tanggung jawab para pekerja untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Brosur-brosur disediakan bagi para pekerja dan kontraktor BP yang menyebutkan perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta apa yang bisa dan tidak bisa diterima sesuai dengan Tata Aturan Tingkah Laku BP. Para pekerja diharapkan melaporkan segala bentuk pelanggaran hak asasi yang mungkin melibatkan pekerja lain atau pihak ketiga lainnya, baik secara langsung kepada manajer mereka atau melalui sambungan telepon OpenTalk BP seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Berkait dengan masyarakat, keluhan dari penduduk lokal terhadap pihak keamanan serta isu hak asasi atau kejadian lain dapat diungkapkan melalui prosedur pengajuan keluhan Tangguh seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, yang memberi ruang bagi diajukannya keluhan secara resmi kepada pihak proyek oleh penduduk setempat. Ini juga mencakup keluhan yang diajukan melalui forum masyarakat di tingkat desa yang baru saja dibentuk.

Penyampaian keuntungan jangka pendek

Rekomendasi TIAP: *Perasaan adanya perlakuan tidak adil yang dirasakan penduduk kawasan pantai utara belum ditangani secara sungguh-sungguh. Sebagai prioritas, BP harus bekerja sama dengan Bupati Bintuni untuk menetapkan program di mana BP dapat mengambil peran mendukung pembangunan perumahan di pantai utara, penyediaan listrik atau peningkatan prasarana lainnya, yang akan membantu memperbaiki adanya prasangka perlakuan tidak adil ini.*

Tanggapan BP: Kami mengakui perlunya menangani persepsi ketidakadilan yang dirasakan penduduk di kawasan pantai utara. Kami memahami potensi bahaya dari persepsi ini akan berakibat pada proyek.

Perlu sekali proyek mengakui adanya perasaan tidak puas diantara penduduk desa-desa kawasan pantai utara, serta mengambil tindakan seperlunya dalam menangani hal ini.

Kami mengakui beberapa perasaan perlakuan tidak adil ini muncul/berasal dari program perumahan yang diterapkan di desa-desa di kawasan pantai selatan, yakni di Tanah Merah, Saengga dan Onar sebagai bagian dari ganti rugi yang disepakati sebagai bagian dari program penempatan kembali⁹.

Menanggapi rekomendasi dan kunjungan sebelumnya, kami sepakat dengan TIAP bahwa di tahun 2005 Proyek Tangguh harus meningkatkan program-programnya dalam rangka menyampaikan keuntungan langsung bagi penduduk yang tinggal di desa-desa yang terkena dampak langsung dari proyek di kawasan pantai utara. Kami memfokuskan diri pada penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan masyarakat serta program skala kecil pelatihan bagi masyarakat serta penyediaan prasarana.

Kami lega bahwa panel mengakui kemajuan yang dicapai serta mengakui tantangan yang telah berhasil diatasi dalam menyampaikan program-program tersebut. Termasuk dalam tantangan tersebut adalah kapasitas para mitra kami serta pemerintahan lokal, serta kurang berfungsinya aparat pemerintah yang disebabkan karena ketidakpastian dalam pembentukan kabupaten baru di Teluk Bintuni, serta musim kampanye berkepanjangan menjelang pemilihan Bupati yang pertama.

TIAP juga merekomendasikan agar proyek mempertimbangkan dukungan terhadap program khusus atau pendanaan dalam bidang penyediaan perumahan. Proyek mengakui rekomendasi ini dan tengah mempertimbangkan satu respon yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam menangani masalah ini, penting sekali untuk memperjelas kerangka situasinya, yakni bahwa keadaan di desa-desa kawasan pantai utara berbeda dengan pemukiman kembali desa-desa di kawasan pantai selatan.

⁹ Rencana Pengalihan lahan dan Pemukiman kembali atau 'The Land Acquisition and Resettlement Action Plan' – tersedia di www.adb.org

Di desa-desa kawasan pantai selatan kami melakukan program pemukiman kembali – berdasar pada persetujuan, konsultasi dan kesepakatan kedua pihak - sehingga proyek dapat menggunakan kawasan itu sepenuhnya menjadi lokasi LNG¹⁰. Di kawasan pantai utara kami berniat meningkatkan pembangunan sebagai bagian dari Program Sosial Terpadu. Segala bentuk program dengan begitu harus dilakukan dalam konteks pembangunan.

Kami yakin peran kami dalam meningkatkan pembangunan di kawasan pantai utara harus dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah dan bukannya menggantikan mandat dan tanggung jawab pemerintah.

Ini sesuai dengan harapan yang dikemukakan Bupati baru yang menyebutkan gagasan '*master plan*' kabupaten, yakni pembangunan kabupaten yang dilakukan dan dijalankan oleh pemda sendiri. Dia meminta agar Proyek Tangguh mempertimbangkan cara-cara agar PST dapat melengkapi dan mendukung rencana tersebut. Kami mempertimbangkan permintaan ini dan akan mengambil tindakan lanjutan dalam pembicaraan dengan Bupati nantinya. Secara khusus dalam tahun 2006 proyek berencana:

- Melanjutkan gagasan pilot proyek pemerintah di bidang kesehatan dan penyediaan perumahan yang dapat menggabungkan penyediaan air bersih dan sarana kesehatan;
- Pembicaraan dengan para pelaksana program, seperti para donor dan organisasi pembangunan, serta dengan pemerintah daerah & BP Migas dalam hal bagaimana cara-terbaik menangani permasalahan di kawasan pantai Utara.
- Bekerja menuju pencapaian pemahaman lebih baik mengenai alasan pembangunan di kawasan pemukiman kembali bagi kawasan yang terkena dampak langsung.
- Mengkomunikasikan lebih baik mengenai PST khususnya pada bagian yang memuat sejumlah program yang berkaitan dengan perhatian pemerintah tingkat Kabupaten serta yang terpenting yakni bergerak dari fokus hanya pada kawasan DTDP yang selama ini dipertahankan oleh Proyek.

Dalam hal penyediaan perumahan, kami mendapatkan pengalaman yang cukup berharga dalam hal proyek penyediaan perumahan yang layak melalui kerja kami di desa Saengga dan Onar Lama, pada saat kegiatan pembangunan pemukiman kembali. Pada khususnya, proyek perbaikan perumahan di Onar Lama dilakukan berdasar inisiatif masyarakat di mana penduduk menyediakan tenaga kerja dan proyek menyediakan bahan serta bantuan teknis. Kami berharap model ini akan mencapai keberhasilan dan bisa menjadi contoh bagi program pemerintah di desa-desa lain dalam menggunakan tipe pendekatan yang sama.

Kami belajar dari pengalaman ini dan yakin bahwa hal ini akan berguna bagi Bupati yang baru. Kami sangat berharap bisa memberikan sumbangan pengetahuan dan dukungan bagi pemerintahan kabupaten yang baru. Bila

¹⁰ Rencana Pengalihan lahan dan Pemukiman kembali atau 'The Land Acquisition and Resettlement Action Plan' – tersedia di www.adb.org

Bupati menerima tawaran ini, kami yakin proyek skala kecil akan memberikan hasil menguntungkan dengan cara menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam mengatasi berbagai hambatan kekurangan kapasitas yang tersedia, sementara di waktu yang sama bisa menyampaikan hasil dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Rekomendasi TIAP : *PAM tahunan harus dilanjutkan setelah fase pembangunan untuk menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek khusus yang dipilih oleh wakil-wakil dari setia DTDP.*

Tanggapan BP: Kami memang berencana melanjutkan Program Aksi Masyarakat (PAM) Proyek Tangguh. Ini tergantung pada proses partisipasi berbasis masyarakat untuk menentukan prioritasnya. Proyek berkomitmen/berniat menyediakan Rp 300 juta (sekitar USD \$ 30,000) per tahun selama 10 tahun bagi setiap DTDP.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan individu, rumah tangga, dan masyarakat dengan cara memperkuat kapasitas /kemampuan mereka untuk merencanakan serta mengelola pembangunan bagi mereka sendiri. Program juga berniat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyusun skala prioritas, dan dengan cara itu juga mengenali serta mengakomodasi kebutuhan dari berbagai anggota komunitas, serta kemampuan merencanakan dan menerapkan proyek-proyek masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama. Informasi lebih lanjut tersedia dalam AMDAL serta dokumen PST yang dimuat dalam situs internet ADB/Bank Pembangunan Asia, juga di situs internet BP www.bp.com/tangguh.

Rekomendasi TIAP: *BP harus melanjutkan pekerjaan bidang Unit Kesehatan Masyarakat , khususnya dalam hal upaya mengontrol atau mengurangi bahaya malaria serta penularan diare di desa-desa tersebut; juga menangani permasalahan kekurangan gizi pada anak. BP harus juga meningkatkan pendidikan penyadaran HIV/AIDS mencakup semua pekerja baru di lokasi LNG dan pangkalannya di Babo.*

Tanggapan BP: Unit kesehatan Masyarakat di jalankan untuk kurun 5 tahun yang dimulai tahun 2003. Prioritasnya termasuk kesehatan ibu dan anak, pengontrolan malaria, pencegahan HIV/AIDS, kebersihan dan air bersih, serta pembangunan kapasitas lembaga terhadap pelayanan kesehatan. Sejak diperkenalkannya program ini empat tahun lalu tingkat kematian karena malaria menurun secara tajam. Namun begitu kami mengakui bahwa hal ini membutuhkan pengawasan jangka panjang serta kewaspadaan yang berlanjut. Dengan makin banyaknya penduduk yang berpindah ke wilayah ini, kesehatan akan terus menjadi prioritas utama.

Kegiatan-kegiatan baru tengah direncanakan, termasuk perluasan program-program yang dianggap berhasil, bekerja dalam bidang kebijakan kesehatan dengan pemerintah serta menetapkan LSM penyedia layanan kesehatan independen yang akan mampu menarik pendanaan dari sumber lain serta memperluas bidang kerjanya.

Kami berencana meningkatkan pendidikan penyadaran HIV/AIDS terhadap semua pekerja di lokasi LNG serta pangkalan kami di Babo, sebuah langkah yang akan dikoordinasikan dengan para kontraktor pembangunan proyek.

Rincian detil dari program kesehatan ini tersedia di situs BP, www.bp.com/tanggung juga di dalam dokumen Program terpadu BP tanggung yang tersedia di situs Bank Pembangunan Asia/ADB, www.adb.org.

Koordinasi dan dukungan bagi pemerintah Daerah

Rekomendasi TIAP: Dengan telah terpilihnya Bupati Bintuni, Panel menekankan kembali rekomendasi sebelumnya agar BP meningkatkan koordinasinya dengan kabupaten baru. BP harus membentuk hubungan kerja yang kuat dengan Bupati serta pejabat-pejabat utama di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Harus dibangun pula jalur kontak serupa dengan para pejabat di Manokwari/Jayapura.

BP harus bekerja sama dengan Bupati dalam hal menjamin dukungan pendidikan yang disediakan di kawasan yang terkena dampak proyek (DTDP) oleh tiga yayasan keagamaan didukung secara baik dan terpadu dengan program pendidikan pemerintah setempat. Harus disediakan pula bea siswa untuk belajar di Universitas-universitas di Papua.

Di tingkat daerah, BP harus meningkatkan konsultasinya dengan pemerintah tingkat kecamatan. Pada khususnya, pertemuan berkala harus diadakan dengan para pejabat tingkat kecamatan di babo dan Randay, memberikan informasi kepada para pemimpin di kawasan itu tentang kemajuan proyek serta memberi kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap pengelolaan Proyek tanggung.

Tanggapan BP: Bupati baru Teluk Bintuni dilantik akhir November 2005. kami sepakat dengan pandangan TIAP pada perlunya membangun hubungan yang konstruktif dengan kepala pemerintahan yang baru. Dalam pembicaraan awal dengan Bupati, beliau telah meminta proyek memikirkan cara-cara kerja sama dengan timnya dalam merencanakan program pembangunan bagi daerahnya. Bupati dan tim proyek akan membentuk sebuah nota kesepakatan (MoU) yang akan mencantumkan proses kerja sama yang meliputi kerja sama dengan departemen-departemen pemerintah daerah dalam kaitan dengan pendidikan, kesehatan, pemerintahan serta pembangunan kapasitas.

Kami juga bertujuan mengadakan pertemuan bulanan dengan para pejabat tingkat daerah di Aranday dan babo. Sebagai tambahan, proyek akan mengadakan hubungan dengan para pejabat di Jayapura dan manokwari.

Rekomendasi TIAP: BP harus mendukung USAID serta lembaga dana lainnya dalam menjalankan program mereka memperkuat kapasitas kelembagaan diantara pemerintah daerah serta masyarakat sipil di kawasan Kepala Burung; dengan memfokuskan diri pada

pembangunanan perencanaan strategis, pengelolaan keuangan serta kapasitas anggaran.

Bekerja sama dengan Bank Dunia, BP harus secara hati-hati memonitor aliran masuk pendapatan dari proyek untuk Papua dan Bintuni. BP harus mampu meyakinkan pemerintah Indonesia untuk secara transparan mempublikasikan proyeksi non-komersial, tanda terima, dan pembayaran yang digunakan dari pendapatan proyek Tangguh; serta harus berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah propinsi dalam mencapai pemahaman lebih baik mengenai ketepatan jumlah pendapatan dari Tangguh. BP juga harus terus melakukan penilaian/review untuk menjamin agar keuntungan yang sesuai sampai ke tangan penduduk setempat sejak awal pembangunan proyek.

Tanggapan BP: Bulan Oktober 2005 Bank Dunia mempublikasikan sebuah laporan, *Papua Public Expenditure Analysis: Regional Financial and Service Delivery in Indonesia's Most Remote Region*, yang memfokuskan perhatian pada isu pengelolaan pendapatan¹¹. Laporan ini dikomisikan oleh pemerintah propinsi Papua, dengan keikutsertaan beberapa universitas Papua serta pemerintah daerah. Ini merupakan kontribusi berharga yang memberi informasi kepada masyarakat Papua mengenai cara-cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan anggaran publik serta penyampaian pelayanan pemerintah.

Dua temuan penting yang menjadi perhatian Tangguh adalah:

Pertama, laporan ini menunjukkan bahwa Proyek Tangguh tidak akan menciptakan rejeki nomplok dalam jumlah besar-besaran bagi Papua dibanding dengan apa yang selama ini sudah diterima.

Ini karena Papua sudah menerima dana dari pemerintah pusat sebagai bagian dari dana bantuan pemerintah pusat bagi daerah/propinsi, serta dana Otonomi Khusus yang ditetapkan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah Papua.

Kedua, laporan ini menyatakan bahwa kabupaten akan menerima keuntungan langsung dari Tangguh. Menurut UU Otda di Indonesia, kabupaten yang memproduksi gas alam di Indonesia menerima 12 % dari pendapatan yang masuk ke pemerintah pusat setelah pajak. Bila pembagian ini berlanjut sebagai bagian dari alokasi pendapatan di bawah UU Otsus Papua, yang akan ditetapkan dengan Aturan Otsus; potensi Kabupaten Teluk Bintuni untuk menerima keuntungan dari Tangguh akan sangat signifikan.

Lebih jauh laporan ini juga memberi tekanan perlunya perhatian lebih banyak bagi kualitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja di tingkat pemerintah Kabupaten dan propinsi. Sebagai contoh, Dana Otsus digunakan untuk penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana, namun dari

¹¹ www.worldbank.org/indonesia

hasil penilaian anggaran belanja terbukti adanya ketidak-konsistenan mengwnai bagaimana dana digunakan serta diarahkan dalam bidang-bidang tersebut¹². Sebagaimana ditekankan oleh laporan tersebut, peningkatan kapasitas pemerintahan yang lebih baik sangat perlu dalam mengurangi angka kemiskinan serta membangun perekonomian Papua. Kami setuju dengan TIAP akan adanya kepentingan mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan serta pengawasan terhadap kemungkinan kelalaian di Kabupaten Teluk Bintuni yang baru terbentuk sehingga pendapatan (termasuk dari Proyek Tangguh) dialokasikan dan diolah secara efektif dan akan memberi keuntungan bagi penduduk Teluk Bintuni dan Kawasan Kepala Burung.

Bank Dunia saat ini mengembangkan rencana meningkatkan kesadaran terhadap hasil temuan ini serta mengadakan penilaian lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah dikombinasikan dengan pemberian bantuan teknis serta kemungkinan bantuan keuangan. Mereka juga mempertimbangkan program yang mungkin bisa meningkatkan kemampuan universitas di Papua serta organisasi lainnya dalam membantu pemerintah setempat mengembangkan kemampuan pengelolaan anggaran belanja.

BP mendukung usaha-usaha ini dan melanjutkan laporan ini dengan memulai pembicaraan awal dengan pihak Bank Dunia mengenai cara-cara bagaimana bekerja sama dengan pemerintah lokal di kawasan ini dengan dukungan dari BP. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, BP juga mendukung USAID serta LSM lainnya, yakni CLGI/YIPD dalam peningkatan kapasitas di kawasan Kepala Burung serta Teluk Bintuni.

Kami yakin transparansi terhadap hasil pendapatan daerah merupakan mekanisme yang dapat meningkatkan kualitas pemerintahan serta pengelolaan pendapatan yang efektif. Tahun 2005 BP mengadakan inisiatif dialog antara Kemenetrian Keuangan, Kementrian dalam Negeri dan Bapennas untuk membahas aliran dari pendapatan dari Proyek Tangguh. Kami akan melanjutkan pembicaraan dengan mereka mengenai cara-cara mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran mengani aliran dana ini di tingkat Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Transparansi juga akan membantu usaha pemerintah dalam mengembangkan Strategi Pertumbuhan Diversifikasi untuk kawasan Kepala Burung. Upaya DGS difasilitasi oleh UNDP, bekerja sama dengan pihak pejabat tingkat Propinsi dan Pemerintah Pusat. Tangguh juga memberikan dukungan dana di bawah satu kesepakatan bersama dengan UNDP. Karena BP merupakan bagian dari Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)¹³, BP juga berupaya mencari

¹² Bantuan Otsus untuk Papua ditetapkan dengan UU no 21 tahun 2001, yakni UU Otsus Papua, dan mulai diberlakukan tahun 2002. Menurut UU ini disediakan dana sebagai tambahan pendapatan dari sumber daya alam yang juga termasuk dalam undang-undang ini. Menurut laporan Bank Dunia, jumlahnya mencapai 1, 8 triliun rupiah (USD \$180 juta) pada tahun 2005, yang berarti adalah 60% dari pendapatan propinsi dan antara 7-23% dari keseluruhan pendapatan pemerintah daerah.

¹³ EITI diluncurkan oleh PM Tony Blair dalam pertemuan puncak mengenai pembangunan berkelanjutan bulan 2002. Inisiatif ini bermaksud meningkatkan transparansi pembayaran perusahaan dari hasil produksi minyak, gas dan pertambangan kepada pemerintah, serta transparansi pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Silakan lihat www.eitransparency.org.

kemungkinan mengadakan pembicaraan antar pemerintah dalam mempromosikan agenda transparansi.

Lingkungan Hidup

Rekomendasi TIAP: *BP harus mengumumkan setiap hasil dari audit AMDAL yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup serta lembaga penilai lingkungan lainnya atau program pemerintah lokal. BP juga harus mempublikasikan segala tindakan yang diambil dalam rangka memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi.*

BP menjalankan prinsip transparansi dan akan selalu memegang teguh prinsip ini di dalam semua kesempatan yang mungkin. Namun begitu untuk penerbitan sejumlah dokumen secara berkala akan berkait dengan persetujuan dari berbagai pihak. Kami tidak memiliki kontrol langsung pada audit kesesuaian AMDAL karena data tersebut dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dalam bentuk catatan rekomendasi. Pertemuan tahunan yang diadakan dengan LSM di berbagai tempat dapat dipandang sebagai mekanisme mempublikasikan informasi terhadap pencapaian kami di bidang lingkungan hidup dan sosial.

Rekomendasi TIAP : *BP harus mendukung kunjungan-kunjungan ke lokasi LNG yang dilakukan pejabat Lingkungan Hidup dari kawasan regional atau lokal, serta memberikan tanggapan segera bila muncul tuntutan berkait dengan persyaratan lingkungan hidup yang tidak dipenuhi.*

Tanggapan BP: Kami menyambut baik kunjungan ke lokasi LNG yang dilakukan pejabat lingkungan dari tingkat regional maupun lokal, dan kami akan mengusahakan segala cara mengkoordinasikan hal ini dengan para wakil tim Tangguh di lapangan. Kami akan terus melanjutkan usaha ini di tahun 2006. Menteri Lingkungan Hidup mengunjungi lokasi bulan November 2005 untuk mengadakan audit kesesuaian Proyek dalam rangka memberikan persetujuan AMDAL, dan saat itu beliau didampingi oleh pejabat dari Departemen Lingkungan Hidup Bintuni. Kunjungan ini difasilitasi oleh Tim Tangguh. Kunjungan serupa berlangsung setiap tahun dan akan terus dilanjutkan tahun 2006 dan seterusnya. Pejabat lapangan bidang lingkungan hidup kami juga mengunjungi pejabat lingkungan hidup Bintuni untuk memberikan up date Program Lingkungan Hidup Tangguh setiap dua atau tiga bulan.

Rekomendasi TIAP : *BP harus melanjutkan dukungannya terhadap kegiatan LSM lingkungan dalam melestarikan ekosistem Teluk Bintuni serta memperkuat kapasitas lingkungan hidup lembaga-lembaga sipil di Papua.*

Tanggapan BP: Kami mengakui perlunya sumbangan LSM lingkungan yang independen dan mampu pada pelestarian Teluk Bintuni. Kawasan Teluk Bintuni dikenal luas di kalangan para pecinta lingkungan memiliki ekosistem Hutan Bakau yang sangat berharga. Namun begitu, pengetahuan ilmiah

mengenai kawasan itu sangat kurang dibanding kawasan lain di Papua. Organisasi Conservation International Irian Jaya melalui sebuah workshop yang diadakan, mengidentifikasi keaneka ragaman hayati Teluk Bintuni masih kurang didokumentasikan.

Sebagai tanggapan, tahun 2003 kami mengadakan pengumpulan data ilmiah serta penyediaan dukungan finansial kepada Proyek Pesisir untuk menyusun atlas sumber daya alam Teluk Bintuni. Kami juga mendukung upaya-upaya memahami permasalahan perikanan Teluk Bintuni dengan bekerja sama dengan Universitas Papua serta mendukung Perlindungan Alam dalam usahanya mengembangkan rencana pengelolaan bagi pelestarian Teluk Bintuni. Rencana pengelolaan itu kini diadopsi oleh pemerintah Indonesia secara resmi. Kami juga telah mengadakan survey awal flora dan fauna tahun 2003, serta survey kelautan terhadap binatang mamalia dan reptilia di tahun 2005. Tahun 2007 survey flora dan fauna akan dilakukan. Kami yakin survei ini akan memberi sumbangan dalam memperkuat kapasitas konservasi bagi organisasi yang bekerja di Papua, khususnya kawasan Teluk Bintuni.

Sebagaimana upaya mengisi kekosongan pengetahuan dengan mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat sipil setempat, kami selalu melibatkan mitra lokal seperti LSM serta staff universitas dalam kegiatan semacam ini. Di masa depan, kegiatan berkait lingkungan hidup akan terus melibatkan LSM Lingkungan setempat serta dukungan dari para ahli tingkat nasional dan internasional.

Informasi Publik

Rekomendasi TIAP: Disamping beberapa inovasi, peningkatan komunikasi di dalam kawasan Proyek Bintuni harus tetap menjadi prioritas. Sangat penting bahwa penduduk yang terkena dampak langsung dari Proyek memahami komitmen mereka serta kemajuan yang dicapai melalui pertemuan-pertemuan dengan mereka. BP harus memperluas penggunaan radio serta brosur sederhana serta mekanisme baru dalam meningkatkan pemahaman penduduk lokal.

Mengetahui bahwa informasi publik di teluk Bintuni adalah sebagian merupakan tantangan teknis, BP harus memperluas penggunaan metode inovatif dan baru yang dipunyainya dalam cara berkomunikasi, yakni menggunakan radio; serta bereksperimen dengan metode tambahan seperti forum komunitas atau video hiburan dalam menyampaikan isus-isu penting.

Tanggapan BP: Kami mengakui bahwa komunikasi di kawasan Teluk Bintuni sangat penting dan harus tetap menjadi prioritas utama di tahun 2006. Tahun 2005 kami melaksanakan rekomendasi TIAP serta memutuskan untuk membentuk unit baru meningkatkan komunikasi, dengan fokus khusus kawasan desa-desa yang terkena dampak langsung/DTDP, serta lebih luas kawasan Kepala Burung. Unit ini terdiri dari staf Papua, dua diantaranya berbasis di lapangan, bekerja dengan staf bidang Pengembangan

Masyarakat dan staf Hubungan Masyarakat. Tujuan umum dari unit ini adalah menjelaskan kegiatan, kebijakan serta komitmen proyek, serta meningkatkan kesadaran akan keuntungannya bagi penduduk sekitar. Kami telah melakukan kemajuan yang berarti di tahun 2005 dan menghasilkan berbagai macam produk baru. Termasuk diantaranya adalah buku komik mengenai topik aturan ketenagakerjaan dan zona eksklusif kelautan, serta buku pegangan untuk digunakan bagi staf lapangan yang menjelaskan PST serta tujuan dari program. Kami juga melanjutkan dukungan bagi para manajer program PST untuk melakukan pertunjukan lapangan ('road shows') berkait topik-topik seperti migrasi ke dalam serta kesehatan. 'Road show' ini mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Bulan Agustus 2005 stasiun radio pertama diluncurkan di Teluk Bintuni, satu di kawasan pantai utara dan satu di pantai selatan, didukung oleh BP dan dilaksanakan oleh LSM setempat. Dewan Penyiaran Masyarakat yang dipilih dari penduduk desa bertanggung jawab menjalankan, mengelola serta memiliki stasiun radio ini. Masih banyak yang bisa dan perlu dikembangkan di dalam dewan serta pengelola radio ini untuk menjamin agar mereka memiliki kapasitas sesuai dalam mengelola dan menjaga kelangsungannya. Untuk alasan inilah kami memperpanjang dukungan terhadap LSM pelaksanaannya.

Strategi tahun 2006 adalah memfokus pada peningkatan hasil yang telah kami miliki serta mengembangkan pendekatan lebih inovatif di bidang komunikasi.

Rekomendasi TIAP: *BP harus melanjutkan upaya mencari cara publikasi media di tingkat regional dan nasional dengan sejumlah tulisan berkaitan dengan sasaran proyek serta keberhasilan pembangunan masyarakat.*

BP response: Kami mengakui bahwa berhubungan dengan media regional dan lokal sangat penting, juga pentingnya mengangkat isu-isu berkait dengan pencapaian proyek serta keberhasilan pembangunan masyarakat. Sebuah strategi media tengah dikembangkan untuk meningkatkan frekuensi pengarahannya pada media serta melakukan pendekatan yang lebih pro-aktif untuk mendapatkan liputan yang lebih luas dalam media lokal dan nasional. Umpan balik dari pengarahannya dilakukan pada media bulan Desember di tingkat nasional berhasil positif, dan pengarahannya berikutnya akan dilakukan awal tahun 2006 di Papua. Briefing akan melibatkan tidak hanya wartawan berbasis Papua tetapi juga akan melibatkan wakil-wakil dari tim program sosial terpadu.

Rekomendasi TIAP: *Mengingat bahwa perusahaan ini telah menerapkan cara inovatif yang sangat berharga dalam menjamin agar Proyek memenuhi persyaratan yang ditentukan, BP harus juga mempertimbangkan menugaskan penyusunan sebuah buku mengenai sejarah Proyek yang dapat diterbitkan di saat produksi gas alam ini dimulai.*

Tanggapan BP: Sebagaimana telah dijelaskan di bagian lain, kami mengakui perlunya menjelaskan tujuan, kegiatan, dan keuntungan proyek secara lebih jelas dan sekomprensif mungkin. Publikasi buku merupakan gagasan inovatif dan kami akan mempertimbangkannya bersamaan dengan cara-cara pencapaian tujuan ini.

LAMPIRAN

Review Rekomendasi TIAP untuk 2005 dan Kemajuan BP

Penekanan kemajuan dalam terpenuhinya komitmen pada TIAP selama tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel ini, diikuti dengan penjelasan singkat dari tindakan yang diambil.

Komitmen	Komentar
Membuka pelatihan khusus sementara di Bintuni.	Permasalahan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
Pusat pelatihan sementara akan mulai memberi pelatihan dalam keahlian seperti pertukangan, pekerja bangunan, serta perawatan mesin.	Pelatihan khusus dilaksanakan di Jayapura – diikuti 75 penduduk desa. Program dikoordinasikan dengan para kontraktor di tahun 2006. Sepakat untuk mengubahnya menjadi pusat pelatihan permanen di Aranday tahun 2006.
Penyediaan air bersih dan sistem sanitasi di DTDP kawasan pantai utara.	Weriager-Mogotira – selesai. Tomu-Ekam – selesai Maret '06 Taroy – selesai Juni 06 Tertunda karena kesulitan teknis dan praktis.
Pengajuan program perbaikan perumahan – termasuk kerjasama dengan masyarakat Pantai Utara, lembaga independen dan pemerintah lokal.	Pemilu tingkat pemerintah daerah memakan waktu sepanjang tahun. Pembicaraan dengan <i>Bupati</i> dimulai.
PAM bergulir - upaya menjamin agar hal ini mendapat dukungan / penekanan dari tokoh masyarakat	Penghitungan selesai. Telah dilakukan penjelasan pada penduduk desa.
Menerapkan proses komunikasi masa krisis dan menjamin adanya aturan jelas terhadap pelaporan kejadian.	Latihan dilaksanakan bulan November
Prosedur yang jelas dan rinci bila ada dugaan pelanggaran kebijakan BP, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi.	Prosedur Hak Asasi dikembangkan dan diterapkan Prosedur Rekrutmen Tenaga Kerja dikembangkan dan diterapkan Penyampaian Keluhan: masih dalam fase persiapan.
Mengumumkan semua pembayaran yang dilakukan melalui kontrak (Tuntunan Keamanan Lapangan)	Pengumpulan data. Persiapan pengumuman
Mulai menerbitkan buletin bulanan dalam Bahasa Indonesia, pada para tokoh kunci di Papua guna menyediakan rincian perkembangan serta kegiatan proyek	Dimulai bulan Juli 2005
Bekerja sama dengan Pengelolaan Sumber Daya alam Pesisir yang didanai USAID	Selesai dilaksanakan

dalam menggandakan peta lingkungan hidup	
Menyediakan laporan perikanan pada pihak pejabat tingkat lokal dan nasional di Indonesia	Telah dilaksanakan

Pelatihan Khusus: Tahun 2005, 75 warga dari DTDL telah menerima pelatihan dalam berbagai bentuk pelatihan khusus di pusat-pusat pelatihan Jayapura dan Malang. Proses perekrutan dan pemilihan ketrampilan difasilitasi oleh pusat pelatihan serta Departemen Tenaga Kerja. Pelatihan khusus berikutnya direncanakan memberikan pelatihan bagi para operator berat dalam mencapai standar untuk mendapatkan sertifikat. Pada saat ini tidak terjadi kemajuan pada pusat pelatihan sementara di Bintuni karena tidak tersedianya lahan. Namun, pembicaraan dengan pemerintah mencapai kesepakatan untuk menetapkan pusat pelatihan permanen di Aranday yang akan dibuka akhir 2006.

Air Bersih dan Sanitasi Pantai Utara DTDP: Sejumlah proyek dilakukan untuk menyediakan air bersih di Taroy, Tomu dan Ekam. Dilakukan sosialisasi cukup lama dengan masyarakat, yang tidak masuk dalam rencana semula. Namun begitu tiga sumber air/sumur berhasil digali di Taroy, sembilan di Ekam, dan tiga Tomu. Proyek ini akan selesai pertengahan 2006. masih terdapat permasalahan kemampuan masyarakat dalam menjaga agar proyek ini terus berjalan masih ada.

Perumahan di Pantai Utara: Hal ini dipengaruhi kekosongan pemerintah daerah. Sejak tahun 2004 posisi pemerintahan propinsi dan kabupaten dipegang oleh pejabat sementara, selama pemilu dirancang. Hal ini menghambat upaya proyek untuk bekerja sama dengan pihak. Pembicaraan tengah berlangsung dengan Bupati baru dan kami berencana mengajukan usulan seperti dijelaskan dalam bagian tanggapan pada 'Penyampaian Keuntungan Jangka Dekat'.

PAM Bergulir: Penjelasan diberikan kepada tim hubungan masyarakat kemudian kepada penduduk desa sehingga dana bergulir PAM dari tahun ke tahun dapat terjadi.

Pelaporan Insiden, prosedur dalam hak asasi: Proyek telah mengembangkan prosedur mengenai (disebut dalam bagian Keamanan dan hak asasi dalam laporan tanggapan ini) penanganan dugaan atau kejadian yang mungkin berkait pelanggaran hak asasi. Prosedur ini melengkapi rencana kesiapan manajemen krisis proyek serta menjelaskan proses agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Sukarela ('the Voluntary Principles') dalam Keamanan dan Hak Asasi. Latihan penanganan krisis Proyek dilaksanakan bulan November 2005.

Pembayaran di bawah Aturan Keamanan Lapangan: Data dikumpulkan dari tahun 2003 sampai pertengahan 2005. sebuah laporan telah tersusun dan tersedia dalam situs BP bulan Meret 2006.

Buletin Papua: Bulan Juli 2005, edisi pertama buletin bulanan baru, “Kabar dari Teluk” – mulai diterbitkan. Terbitan ini disebarakan diantara masyarakat serta di kawasan kota regional Bintuni, Fak Fak, Sorong dan Manokwari.

Dokumen Lingkungan Hidup: Laporan perikanan tersedia bagi pihak berwenang tingkat nasional dan lokal serta sebuah seminar diadakan tahun 2005 membicarakan isu-isu Perikanan Teluk Bintuni. Kopi dari peta lingkungan hidup disediakan bagi pihak perencana lingkungan dalam pemerintahan di Papua.